

DAMPAK KESENJANGAN AKSES PENDIDIKAN TINGGI TERHADAP MOBILITAS SOSIAL

Nudin

(STIS Al-Syaikh Abdul Wahid Kota Baubau Sulawesi Tenggara)

Email: gaulnudin@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia. Ada beberapa kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Pendidikan tinggi dan mobilitas social, salah satunya yang relevan adalah kerangka konseptual Inequality of Educational Opportunity (IEO) dan Inequality of Social Opportunity (ISO) yang dikemukakan oleh Raymond Boudon. Namun, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan berkualitas, khususnya di daerah rural, menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam peluang peningkatan status sosial. Hasil analisis menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni ketimpangan sosial-ekonomi dan disparitas geografi dan kultural. Semakin rendah ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat akan berdampak pada semakin meningkatnya akses masyarakat ke pendidikan tinggi dan pada gilirannya akan mendorong terjadinya mobilitas sosial vertical.

Kata Kunci :Pendidikan Tinggi, Mobilitas Sosial, Ekonomi

PENDAHULUAN

Pendidikan telah lama diakui sebagai katalis penting untuk mobilitas sosial, terutama di Indonesia, dimana dinamika sosio-ekonomi yang kompleks mempengaruhi peluang individu untuk naik kelas. Hubungan antara pendidikan dan peningkatan kualitas hidup individu menjadi jelas. Investasi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang tetapi juga membuka pintu menuju peluang ekonomi yang lebih baik, memfasilitasi pergerakan ke atas dalam struktur social (Yuniarto, 2016).

Konsep ini mengakar pada pemahaman bahwa pendidikan formal berkualitas menawarkan akses ke pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik dan, oleh karenanya, ke status sosial yang lebih tinggi. Individu dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, melalui pendidikan, diberikan kesempatan untuk mengubah nasib mereka dan menapaki tangga social (Madiistriyatno, Rekarti, & Sularno, 2023). Kisah-kisah sukses personal, di

mana pendidikan berfungsi sebagai sarana pembebasan dari kemiskinan, merupakan bukti nyata dari potensi mobilitas yang bisa diwujudkan melalui jalur akademik.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan yang signifikan, seperti ketimpangan dalam akses ke pendidikan berkualitas antara daerah urban dan rural serta antara kelompok ekonomi yang berbeda, yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi pendidikan sebagai motor penggerak mobilitas social (Bahri, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses yang jauh lebih baik ke pendidikan berkualitas tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga miskin. Misalnya, sekolah-sekolah swasta elite di kota-kota besar memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan guru yang lebih berkualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri di daerah pedesaan (Muvid, 2022).

Seiring dengan adanya globalisasi dan evolusi ekonomi yang berbasis pengetahuan (the knowledge-based economy), terjadi perubahan secara dramatis dalam konstelasi karakter dan fungsi pendidikan di seluruh dunia (Burbules & Torres 2000; Crossley 2000). Seiring dengan adanya globalisasi dan evolusi ekonomi yang berbasis pengetahuan (the knowledge-based economy), terjadi perubahan secara dramatis dalam konstelasi karakter dan fungsi pendidikan di seluruh dunia (Burbules & Torres 2000; Crossley 2000). Salah satunya adalah menjadikan perguruan tinggi sebagai instrumen penting dari persaingan global sehingga banyak negara di dunia berupaya untuk meningkatkan jumlah perguruan tinggi dan pendidikan profesional. Namun, pertumbuhan jumlah perguruan tinggi yang pesat tersebut ternyata berdampak negative terhadap ketenagakerjaan dan mobilitas social. Sebagai contoh di Amerika Serikat (USA) hanya 52% lulusan perguruan tinggi yang bekerja sesuai dengan keahlian (ijazah), sementara itu sekitar 48% lulusan ternyata memiliki kualifikasi berlebih terhadap pekerjaan yang dimiliki (Vedder, Denhart, dan Robe 2013).

Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mendorong mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan individu dalam masyarakat (Hendrizar, Joni, Hijrat, Wandu, & Afrita, 2024). Namun, di banyak daerah, termasuk Sangatta Selatan, kesenjangan akses pendidikan masih menjadi masalah yang signifikan. Keterbatasan akses ini seringkali diperparah oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah, yang berdampak langsung pada kemampuan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini berkontribusi pada terbatasnya peluang mobilitas sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda (Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, & Daryono, 2024).

Korelasi positif antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan, yang didukung oleh data statistik, menegaskan lagi pentingnya pendidikan. Namun, untuk sepenuhnya memahami dinamika antara pendidikan dan mobilitas sosial, perlu diakui adanya faktor lain yang berperan. Kesenjangan sosial, faktor ekonomi keluarga, dan kualitas pendidikan yang diterima individu semuanya mempengaruhi efektivitas pendidikan sebagai alat untuk mobilitas sosial (Yasin & Jumarni, 2022). Hanushek & Woessmann (2020), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan memiliki

korelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial dengan sistem pendidikan yang lebih menyeluruh dan berkualitas tinggi cenderung memiliki tingkat mobilitas sosial yang lebih baik. Selain itu, (Efendi & Sholeh, 2023), menyatakan bahwa lingkungan pendidikan yang mendukung, termasuk kualitas sekolah dan guru, memiliki dampak signifikan pada pencapaian ekonomi jangka panjang siswa.

Berbagai studi empiris menunjukkan hasil pro dan kontra terhadap hubungan antara level pendidikan dan mobilitas sosial. Beberapa studi empiris terutama yang menggunakan perspektif human capital theory menyimpulkan adanya korelasi yang positif antara jenjang pendidikan dan tingkat pendapatan (gaji). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima sehingga mendorong terjadinya mobilitas sosial naik (upward social mobility) (Checchi 2004; Becker 1993; Psacharopoulos, 1994; Psacharopoulos dan Patrinos, 2004). Sementara itu, beberapa sosiolog memiliki pandangan berbeda bahwa tingkat pendapatan dan mobilitas sosial tidak dipengaruhi terutama oleh faktor tingkat pendidikan (Young 1990). Beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang mengejutkan bahwa latar belakang keluarga (family background) ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mobilitas sosial (Brown et al. 2001; Dale 2015; Coleman et al. 1966). Dengan demikian, temuan beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa studi tentang mobilitas sosial perlu mempertimbangkan bukan hanya faktor capaian level pendidikan tetapi juga pengaruh latar belakang keluarga dan reproduksi sosial. Oleh karena itu, bagaimana peran perguruan tinggi terhadap mobilitas sosial serta munculnya pro dan kontra dari beberapa penelitian sebelumnya menjadi pendorong utama untuk melakukan investigasi peran pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial di Indonesia yang kemudian dituangkan menjadi tulisan artikel ini.

METODE PENELITIAN

Studi peran pendidikan tinggi terhadap mobilitas sosial di Indonesia ini menggunakan penelitian data sekunder. Dalam studi ini, mobilitas sosial berperan sebagai variabel dependen dan pendidikan tinggi menjadi variabel independen. Selain itu, studi ini juga menjelaskan fungsi dari beberapa variabel antara (latar belakang sosial, status ekonomi, disparitas geografi dan kultural) yang menjembatani antara variabel dependen dan independen. Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang berupa data statistik dan laporan-laporan studi empiris tentang pendidikan tinggi di Indonesia, baik yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional maupun yang tidak dipublikasikan. Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi data demografi mahasiswa dan latar belakang sosial-ekonomi. Analisis data sekunder dilakukan dengan metode deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia.

Pendidikan Tinggi, Peluang Pendidikan (*Educational Opportunity*), dan Mobilitas Sosial

Pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam membentuk masa depan individu dan masyarakat. Sebagai salah satu instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan tinggi tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membuka peluang bagi mobilitas sosial. Peluang pendidikan (*educational opportunity*) yang merata menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi tantangan bagi banyak kelompok masyarakat, terutama mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu sarana utama untuk meningkatkan kapabilitas individu. Menurut Trow (1973), pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk mobilitas sosial. Peluang pendidikan yang merata memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Mobilitas sosial merujuk pada pergerakan individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai "tangga mobilitas" yang memungkinkan individu untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi. Menurut Bourdieu (1986), modal budaya dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan tinggi dapat menjadi alat untuk mencapai mobilitas vertikal. Meskipun pendidikan tinggi memiliki potensi besar untuk meningkatkan mobilitas sosial, akses terhadapnya seringkali tidak merata. Faktor seperti kemiskinan, lokasi geografis, dan diskriminasi gender dapat menghambat akses individu terhadap pendidikan tinggi (UNESCO, 2015). Pendidikan tinggi memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja. Lulusan perguruan tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan status sosial mereka. Studi oleh Checchi (2006) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan mobilitas sosial di berbagai negara.

Tantangan dalam Akses Pendidikan Tinggi

- **Keterbatasan Ekonomi:** Biaya pendidikan tinggi yang mahal sering menjadi penghalang utama bagi individu dari keluarga berpenghasilan rendah.
- **Diskriminasi Gender dan Etnis:** Di beberapa negara, perempuan dan kelompok minoritas masih menghadapi diskriminasi dalam mengakses pendidikan tinggi.
- **Kesenjangan Geografis:** Akses terhadap institusi pendidikan tinggi seringkali terbatas di daerah pedesaan atau terpencil.

Menurut Bourdieu (1986), pendidikan tinggi tidak hanya memberikan modal intelektual tetapi juga modal budaya dan sosial. Modal budaya mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang diperoleh melalui pendidikan, sementara modal sosial merujuk pada jaringan dan hubungan yang dibangun selama masa studi. Kedua bentuk modal ini dapat

digunakan untuk mencapai mobilitas vertikal, terutama bagi individu dari latar belakang ekonomi lemah. Studi oleh Checchi (2006) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan status sosial. Di banyak negara, lulusan perguruan tinggi memiliki peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang hanya menyelesaikan pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berfungsi sebagai "tangga mobilitas" yang memungkinkan individu untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi.

Namun, mobilitas sosial melalui pendidikan tinggi tidak terjadi secara otomatis. Goldthorpe (2014) menekankan bahwa mobilitas sosial juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, di negara-negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi, akses terhadap pendidikan tinggi seringkali terbatas bagi kelompok marginal, sehingga mobilitas sosial menjadi sulit tercapai.

Peluang pendidikan merujuk pada kesempatan yang dimiliki individu untuk mengakses dan menyelesaikan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Peluang pendidikan yang merata dianggap sebagai kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap pendidikan tinggi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status ekonomi, lokasi geografis, gender, dan latar belakang etnis. Diskriminasi gender dan etnis juga menjadi faktor penghambat. Di beberapa negara, perempuan dan kelompok minoritas masih menghadapi hambatan budaya dan struktural dalam mengakses pendidikan tinggi. Misalnya, Sen (1999) mencatat bahwa di beberapa masyarakat patriarki, perempuan sering diprioritaskan untuk menikah daripada melanjutkan pendidikan tinggi.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, berbagai upaya telah dilakukan, seperti program beasiswa, bantuan keuangan, dan kebijakan afirmatif. Mincer (1974) menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dapat menghasilkan pengembalian ekonomi yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi pembangunan nasional.

Meskipun pendidikan tinggi memiliki potensi besar untuk meningkatkan mobilitas sosial, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- Ketimpangan Ekonomi: Biaya pendidikan tinggi yang mahal seringkali menjadi penghalang bagi individu dari keluarga berpenghasilan rendah. Di banyak negara, siswa dari keluarga kaya memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pendidikan tinggi dibandingkan dengan siswa dari keluarga miskin.
- Kualitas Pendidikan yang Tidak Merata: Tidak semua institusi pendidikan tinggi menawarkan kualitas pendidikan yang sama. Institusi prestisius seringkali hanya dapat

diakses oleh siswa dari latar belakang ekonomi kuat, sementara institusi dengan kualitas lebih rendah menjadi pilihan bagi siswa dari keluarga miskin.

- **Diskriminasi dan Bias Sosial:** Diskriminasi berdasarkan gender, etnis, atau status sosial dapat menghambat akses terhadap pendidikan tinggi. Misalnya, di beberapa negara, kelompok minoritas menghadapi diskriminasi dalam proses penerimaan mahasiswa.
- **Kurangnya Dukungan Sosial:** Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah seringkali kekurangan dukungan sosial, seperti akses terhadap bimbingan belajar, informasi tentang beasiswa, dan jaringan sosial yang dapat membantu mereka dalam proses pendaftaran.

Untuk meningkatkan kesetaraan peluang pendidikan dan mobilitas sosial, beberapa strategi dapat diimplementasikan:

- **Program Beasiswa dan Bantuan Keuangan:** Pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyediakan beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Program seperti ini dapat mengurangi beban finansial dan memungkinkan lebih banyak siswa untuk mengakses pendidikan tinggi.
- **Pendidikan Jarak Jauh dan Online:** Teknologi digital memungkinkan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, yang dapat menjangkau siswa di daerah terpencil. Program seperti ini dapat mengurangi kesenjangan geografis dalam akses pendidikan tinggi.
- **Kebijakan Afirmatif:** Kebijakan afirmatif, seperti kuota untuk siswa dari kelompok marginal, dapat membantu meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi. Misalnya, di India, kebijakan reservasi untuk kelompok terbelakang (Scheduled Castes dan Scheduled Tribes) telah membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi.
- **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Pemerintah perlu berinvestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di semua institusi, bukan hanya di institusi prestisius. Hal ini dapat memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.

Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia

Mobilitas sosial dalam suatu masyarakat tentu dipengaruhi oleh banyak faktor dan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial (Ianneli & Peterson 2007; Haveman & Smeeding 2006). Beberapa studi empiris tentang hubungan antara jenjang pendidikan dan gaji yang diperoleh menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan tingkat pendapatan (Mok 2015). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan menjadi faktor determinan terhadap mobilitas sosial. Hubungan positif antara pendidikan dan mobilitas sosial ditegaskan pula oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pattinasarany (2012) di dua provinsi di Indonesia,

yakni Jawa Barat dan Jawa Timur. Hasil penelitian (estimasi mobilitas) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar pula ia memperoleh mobilitas ke atas (upward mobility). Estimasi mobilitas vertikal naik (ayah-anak) menggambarkan bahwa responden dengan pendidikan setara SMP (Sekolah Menengah Pertama) memiliki peluang 21,3% lebih tinggi untuk naik kelas sosial daripada mereka yang berpendidikan SD (Sekolah Dasar) atau lebih rendah. Sementara itu, peluang mobilitas naik semakin tinggi pada mereka yang berpendidikan setara SMA (25,2%) dan perguruan tinggi (46,1%).

Meskipun begitu, di balik korelasi positif antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial vertikal terdapat isu ketimpangan sosial (social inequality) yang seringkali diabaikan dalam analisis penelitian mobilitas sosial. Hal ini terjadi umumnya karena para peneliti abai melakukan analisis kritis terhadap fakta dominasi dan opresi yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa studi empiris menemukan fakta bahwa akses terhadap pendidikan tinggi tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang semata melainkan juga yang terutama adalah latar belakang sosial-ekonomi keluarga (family background) (Gao 2011; Brown, Lauder & Ashton 2011). Kondisi ini ditambah dengan adanya perubahan global (globalisasi) yang berdampak pada perubahan prediktor mobilitas sosial di mana saat ini kepemilikan ijazah/sertifikat pendidikan tinggi belum tentu berimplikasi langsung terhadap kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan terutama terjadinya mobilitas sosial vertikal.

Status Sosial Ekonomi

Beberapa studi empiris telah menegaskan hubungan yang positif diantara status sosial-ekonomi, peluang pendidikan, dan mobilitas sosial (Haveman dan Smeeding 2006; Pattinasarany 2012; Triventi 2013). Hasil studi yang dilakukan oleh Pattinasarany (2012) di wilayah perkotaan di provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur menggambarkan bahwa pola mobilitas sosial vertikal lebih banyak dinikmati oleh kelompok individu yang berasal dari kelas menengah ke atas. Fenomena serupa juga terjadi di belahan Eropa, terutama di Inggris di mana akses dan performa pendidikan cenderung lebih baik bagi kelompok individu dengan status sosial-ekonomi yg lebih tinggi dan mereka juga cenderung lebih mudah memperoleh akses ke institusi pendidikan tinggi yang lebih prestisius (Ball 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2014) terhadap pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia juga menguatkan hubungan positif antara status sosial-ekonomi dan tingkat akses terhadap pendidikan tinggi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap mobilitas sosial. Penelitian tersebut menyajikan hasil bahwa siswa dengan status sosial dan ekonomi yang rendah memiliki peluang yang kecil untuk mengenyam pendidikan tinggi. Survei yang juga dilakukan oleh World Bank (2014) terhadap 1.800 siswa SMU di sembilan provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 94–95% responden berasal dari keluarga yang

berkategori berpenghasilan rendah dan memiliki hambatan pendanaan untuk melanjutkan ke universitas-universitas negeri favorit.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menawarkan bantuan pendanaan dalam skema beasiswa, seperti BIDIK MISI. Beasiswa BIDIK MISI bertujuan untuk meningkatkan akses siswa yang memiliki status sosial-ekonomi rendah tetapi berprestasi akademik di atas rata-rata ke lembaga pendidikan tinggi yang bermutu. Penerima beasiswa BIDIK MISI dari Kemdikbud sesungguhnya meningkat terus dari tahun 2010 sebanyak 20.000 siswa menjadi 50.000 siswa pada tahun 2013 (World Bank 2014). Hal serupa juga dilakukan oleh Kemristekdikti yang menawarkan beberapa skema beasiswa dari berbagai pihak, seperti pihak swasta, filantropi, dan pemerintah daerah. Skema beasiswa ini mampu menjangkau sekitar 180.000 mahasiswa (World Bank 2014). Meskipun demikian, jumlah ini sesungguhnya relatif kecil dibandingkan dengan proporsi calon mahasiswa potensial yang tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi karena sebab pendanaan (Logli 2016). Terlepas dari skema BIDIK MISI yang inovatif dan menargetkan siswa SMU dari keluarga miskin, beberapa skema pemberian beasiswa lainnya masih belum mempertimbangkan aspek ketimpangan terkait peluang sosial dan pendidikan (*inequality of social and educational opportunities*). Beberapa skema pemberian beasiswa sebagian besar didasarkan pada prestasi (*meritokratik*) akademik calon penerima beasiswa di jenjang pendidikan sebelumnya dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Persyaratan semacam ini seringkali menghambat akses bagi para siswa yang berasal dari kelompok masyarakat dengan status sosial-ekonomi yang rendah karena mereka memiliki keterbatasan biaya untuk membayar kursus-kursus ekstrakurikuler dalam rangka mendongkrak prestasi anak di sekolah. Selain itu, jumlah beasiswa yang diterima umumnya hanya mengganti sebagian biaya kuliah atau tunjangan hidup mahasiswa sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan status sosial ekonomi mahasiswa (World Bank 2014).

Disparitas Geografi dan Kultural

Istilah disparitas geografi merujuk pada kondisi tidak tersedianya infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal dan umumnya terpencil (Moeliodihardjo 2010). Disparitas geografi yang terjadi di Indonesia ternyata memiliki efek terhadap tingkat aksesibilitas seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi. Gambaran hubungan antara keduanya terefleksikan dalam skema beasiswa BIDIK MISI. Implementasi skema beasiswa BIDIK MISI dari Dikti yang menjangkau calon mahasiswa dari masyarakat miskin ternyata masih terpusat di pulau Jawa dan belum menjangkau kelompok-kelompok masyarakat miskin di luar pulau Jawa (World Bank 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (2014) menunjukkan ketimpangan terkait dengan peluang pendidikan antara kelompok miskin di pulau Jawa dan Sumatera. Dalam konteks ini telah terjadi disparitas geografi antara kelompok miskin di pulau Jawa dan non-Jawa.

Lokasi wilayah yang jauh dari pusat kota juga seringkali menjadi hambatan akses ke pendidikan tinggi. Hasil penelitian World Bank (2014) menunjukkan bahwa hampir 58% siswa yang masuk ke perguruan tinggi dari kelompok sosial terendah berasal dari daerah-daerah pedesaan. Minimnya jumlah perguruan tinggi yang bermutu dan kurangnya informasi menjadi hambatan utama bagi kelompok masyarakat di wilayah pedesaan dan daerah-daerah yang dikategorikan sebagai tiga T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal). Untuk konteks ini, pendidikan tinggi jarak jauh atau daring (online) bisa menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan akses masyarakat.

Disparitas kultural menggambarkan bahwa tingkat aksesibilitas ke pendidikan tinggi juga dipengaruhi oleh status suku, bahasa, dan aspek gender. Negara Indonesia yang memiliki hampir 300 ribu suku juga memiliki lebih dari 700 bahasa lokal yang digunakan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran di sekolah seringkali menjadi hambatan bagi anak-anak yang menggunakan bahasa ibu (lokal) di rumah. Hasil penelitian Bank Dunia (2014) menunjukkan bahwa angka tinggal kelas dan putus sekolah anak-anak yang tidak berbahasa Indonesia di rumah jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang mampu berbahasa Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan tinggi memainkan peran krusial dalam membuka peluang pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial. Namun, akses terhadap pendidikan tinggi masih belum merata, terutama bagi kelompok marginal. Untuk meningkatkan kesetaraan peluang pendidikan, diperlukan upaya seperti program beasiswa, pendidikan jarak jauh, dan kebijakan afirmatif. Dengan mengatasi tantangan ini, pendidikan tinggi dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mencapai mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Diskursus tentang mobilitas sosial dalam suatu masyarakat seringkali digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi sekaligus menutupi fakta tentang ketimpangan sosial. Kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin seringkali dihadirkan sebagai fakta lumrah sebagai akibat dari prestasi akademik atau profesional seseorang. Padahal di balik semua itu terdapat berbagai fakta ketimpangan sosial yang mempengaruhi akses seseorang untuk memperoleh pendidikan tinggi sebagai sarana utama untuk memperoleh mobilitas vertikal.

Analisis terhadap mobilitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa capaian dalam pendidikan tinggi merupakan faktor penting terhadap perolehan mobilitas sosial vertikal. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat hambatan untuk memperoleh pendidikan tinggi yang disebabkan oleh berbagai ketimpangan sosial. Pada konteks ini, kerangka konseptual IEO (Inequality of Educational Opportunity) dan ISO (Inequality of Social Opportunity) yang dikemukakan oleh Raymond Boudon (1974; 1976) relevan untuk dijadikan alat analisis mobilitas sosial di Indonesia. Hubungan antara

pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai ketimpangan dalam masyarakat, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, geografi dan kultural. Dengan demikian, peningkatan mobilitas sosial vertikal merupakan konsekuensi dari penurunan ketimpangan sosial-ekonomi, geografi dan kultural dalam Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing.
- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). Greenwood.
- Checchi, D. (2006). *The Economics of Education: Human Capital, Family Background, and Inequality*. Cambridge University Press.
- Gao, L. 2011. *Impacts of Cultural Capital on Student College Choice in China*. Lanham, MD: Lexington Books.
- Goldthorpe, J. H. (2014). *The Role of Education in Intergenerational Social Mobility: Problems from Empirical Research*. *Sociology of Education*, 87(4), 259-271.
- Haveman, R dan T. Smeeding. 2006. "The Role of Higher Education in Social Mobility." *The Future of Children* 16(2):125-150.
- Hout, M. (2012). *Social and Economic Returns to College Education in the United States*. *Annual Review of Sociology*, 38, 379-400.
- Madiistriyatno, H., Rekarti, E., & Sularno, H. M. (2023). *Membentuk Sisi Individu Unggul Berkarakter Berwirausaha*. Indigo Media.
- Moeliodihardjo, B.Y. 2013. *Equity and Access in Higher Education*. World Bank: Jakarta
- Muvid, M. B. (2022). *Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia*. *Widya Balina*, 7(2), 469– 476.
- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. National Bureau of Economic Research.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- UNESCO. (2015). *Education for All 2000-2015: Achievements and Challenges*. UNESCO Publishing.
- Vedder, R., C. Denhart, & J. Robe. 2013. "Why Are Recent College Graduates Underemployed? University Enrollments and Labor-Market Realities." Center for College Affordability and Productivity (NJ1). Retrieved February 7, 2017 (<http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539373.pdf>).
- Yuniarto, P. R. (2016). *Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67–95